



Peran Partai Politik Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Ummadinatus Sholehah^{1✉}, Dinda Nabila Margaretha², M. Iklal Hafidzi³, Mashudi⁴

^{1,2,3}Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura

⁴Dosen Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

Kata Kunci:

*Partai Politik Islam, Kebijakan
Ekonomi Syariah, Negara
Demokrasi*

Tujuan dari penelitian ini yakni menentukan peran partai politik Islam dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia saat ini. Partai politik Islam memiliki peran signifikan dalam sistem politik di banyak negara demokrasi, terutama di negara-negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Partai politik Islam juga sering kali menarik perhatian dalam konteks ekonomi global, terutama dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin dikenal di berbagai negara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan dengan cara menggambarkan penulisan berdasarkan penafsiran situasi yang sedang terjadi saat ini. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk mencapai tujuan dari penelitian, didalamnya terdapat peran-peran dalam partai politik Islam untuk menghadapi masalah yang ada dan kebijakan ekonomi syariah.

Key Words:

*Islamic Political Party, Sharia
Economic Policy, Democratic
State*

The purpose of this study is to determine the role of Islamic political parties in sharia economic policies in Indonesia today. Islamic political parties have a significant role in the political system in many democratic countries, especially in countries with a Muslim majority such as Indonesia. Islamic political parties also often attract attention in the context of the global economy, especially with the development of sharia economics which is increasingly recognized in various countries. The method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Qualitative descriptive research is a method used by describing writing based on the interpretation of the current situation. The results of this study are used as material to achieve research objectives, in which there are roles in Islamic political parties to deal with existing problems and sharia economic policies.

Corresponding Penulis :

Alamat: Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: ummadinatus29@gmail.com

ISSN 2964-6421

PENDAHULUAN

Partai politik Islam memiliki peran signifikan dalam sistem politik di banyak negara demokrasi, terutama di negara yang mayoritas Muslim. Partai politik Islam dalam konteks ini, sering kali menjadi wadah aspirasi bagi umat Muslim yang menginginkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan alternatif sistem ekonomi yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama (Rizwan et al., 2023).

Partai politik Islam juga sering kali menarik perhatian dalam konteks ekonomi global, terutama dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin dikenal di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Dengan adanya partai politik Islam yang memperjuangkan ekonomi syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Sarip et al., 2020).

Salah satu contoh partai politik Islam yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan ekonomi syariah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. PKS telah aktif dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti pembangunan ekonomi berbasis keadilan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, PKS juga turut berperan dalam mengawal implementasi ekonomi syariah di Indonesia, seperti pengembangan lembaga keuangan syariah dan promosi produk-produk halal. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh PKS dan partai politik Islam lainnya, diharapkan dapat mendorong terciptanya ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat (Siregar, 2020).

Permasalahan yang terjadi saat ini bahwa Partai Politik Islam sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan mekanisme dan nilai-nilai sistem demokrasi yang pluralis dan sekuler. Di negara demokrasi, proses pembuatan kebijakan melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang ideologi yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan ekonomi berbasis syariah memerlukan kompromi dan negosiasi. Selain itu, partai-partai ini harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai syariah dalam kerangka yang dapat diterima oleh semua pihak dalam sistem demokrasi (Suryana et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nur Fitri Rahmadani dengan judul Peran Partai Politik di Indonesia dalam Pengembangan Penerapan Hukum Islam dengan metode penelitian hukum *normative* atau penelitian kepustakaan (*library research*), menunjukkan bahwa peran partai politik dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia sangatlah penting. Tidak hanya berperan dalam pendidikan masyarakat dan sosialisasi hukum Islam di samping legislasi dan kebijakan. Akan tetapi, lembaga ini juga harus berhadapan dengan kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara ajaran Islam dan cita-cita demokrasi dan pluralistik. Tujuan dari penelitian ini yakni menentukan peran partai politik Islam dalam kebijakan ekonomi syariah di negara demokrasi saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian deskriptif berupaya mengkarakterisasikan peristiwa kontemporer, baik yang alamiah maupun buatan. memahami fenomena manusia atau sosial, membangun gambaran menyeluruh dan rumit yang dapat diungkapkan secara verbal, memberikan perspektif mendalam yang dikumpulkan dari sumber informan, dan melakukan penelitian di lingkungan yang kompleks semuanya dicapai melalui penelitian kualitatif (Fadli, 2021). Pendekatan kualitatif berfokus pada definisi, logika, dan signifikansi keadaan tertentu. menggambarkan secara tepat fakta dan ciri-ciri dari hal atau subyek yang diteliti merupakan tujuan penelitian dengan metodologi ini. data yang digunakan yakni data primer yang mengacu pada data langsung yang dikumpulkan dan diolah oleh

peneliti. Sumber data yang digunakan berasal dari jurnal, situs web atau dari referensi yang serupa dengan apa yang ditulis oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyikapi permasalahan yang dihadapi saat ini bahwa di negara demokrasi, proses pembuatan kebijakan melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang ideologi yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan ekonomi berbasis syariah memerlukan kompromi dan negosiasi. Berikut solusi yang penulis tawarkan dalam hal tersebut :

1. Dialog Terbuka dan Diskusi Inklusif

Membangun ruang dialog yang inklusif antara partai politik Islam dengan partai-partai lain serta berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi ekonomi, dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi terbuka ini penting untuk saling memahami perspektif dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama (Farhan, 2023).

2. Mengutamakan Aspek-Aspek Umum Ekonomi Syariah

Fokus pada aspek-aspek ekonomi syariah yang memiliki kesamaan dengan prinsip ekonomi universal, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pemberantasan kemiskinan. Hal ini dapat mempermudah penerimaan dari pihak-pihak dengan latar belakang ideologi yang berbeda (Budiono & Masing, 2022).

3. Penyusunan Kebijakan yang Fleksibel dan Bertahap

Mengadopsi pendekatan bertahap dalam penerapan kebijakan ekonomi syariah. Dimulai dengan kebijakan yang tidak kontroversial dan memiliki dukungan luas, kemudian secara bertahap memperkenalkan kebijakan yang lebih spesifik. Fleksibilitas dalam penyusunan kebijakan juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan ekonomi (Djakfar et al., 2019).

4. Pendekatan Koalisi dan Aliansi

Membangun koalisi dan aliansi dengan partai-partai politik lain untuk memperkuat dukungan legislatif. Kerjasama politik ini memungkinkan kompromi dan negosiasi yang lebih efektif dalam pembentukan kebijakan ekonomi berbasis syariah.

5. Edukasi dan Sosialisasi kepada Publik

Menedukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui kampanye sosialisasi. Peningkatan pemahaman publik dapat meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan dan meminimalisir resistensi.

6. Menyusun Argumentasi Ekonomi yang Kuat

Mengembangkan argumentasi ekonomi yang kuat dan berbasis data untuk mendukung kebijakan syariah. Menyajikan bukti empiris tentang keberhasilan implementasi ekonomi syariah di negara lain dapat memperkuat posisi dalam negosiasi (Amane et al., 2024).

7. Penguatan Kapasitas Institusi

Memperkuat kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ekonomi syariah. Institusi yang kuat dan kredibel dapat memastikan kebijakan diterapkan secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

8. Mengakomodasi Kepentingan Beragam Pihak

Menyusun kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan latar belakang ideologi berbeda. Pendekatan ini melibatkan pemahaman dan penyesuaian terhadap kebutuhan dan kekhawatiran semua kelompok yang terlibat (Sauri, 2023).

Adapun peran partai politik Islam untuk negara yang demokrasi dalam membentuk kebijakan ekonomi syariah sebagai berikut :

1. Penyesuaian dengan Dinamika Ekonomi Global

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, partai politik Islam berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. Di Indonesia, misalnya, partai-partai Islam seperti PKS dan PPP telah mendorong pengembangan sektor perbankan syariah, yang tidak hanya menarik bagi umat Islam tetapi juga kompetitif di pasar global. Perbankan syariah ini menawarkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, yang juga menarik minat investor internasional yang mencari alternatif investasi etis (Khasanah & Paryanto, 2023).

2. Dukungan Masyarakat dan Pluralisme

Untuk mendapatkan dukungan yang luas, partai politik Islam berusaha untuk menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi syariah dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya umat Islam. Mereka menekankan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam kebijakan mereka. Misalnya, program-program zakat dan wakaf yang didorong oleh partai-partai ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang merupakan isu yang relevan bagi semua warga negara. Pendekatan ini membantu mereka menarik dukungan dari kelompok-kelompok non-Muslim dan memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi syariah di mata publik (Aprianto, 2018).

3. Kapasitas Institusional dan Implementasi Kebijakan

Partai politik Islam juga berperan dalam memperkuat kapasitas institusional yang diperlukan untuk implementasi kebijakan. Pengembangan kapasitas merupakan pendekatan yang luas digunakan dalam pembangunan masyarakat. Program yang memberikan pendidikan dan pelatihan politik kepada perempuan berhasil meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri mereka untuk terlibat dalam politik. Diskriminasi gender dalam partai politik dan organisasi pemerintah merupakan salah satu contoh tantangan kelembagaan dan budaya yang harus diatasi oleh perempuan dalam kepemimpinan politik (Baharudin, 2022).

4. Fragmentasi Internal dan Persaingan Politik

Meskipun terdapat fragmentasi internal di antara partai-partai Islam, mereka sering kali mampu bersatu untuk tujuan bersama. Misalnya, dalam pemilu, partai-partai Islam di Indonesia kadang-kadang membentuk koalisi untuk meningkatkan kekuatan politik mereka. Persaingan internal dapat diatasi melalui dialog dan kompromi, serta melalui fokus pada tujuan bersama yaitu penerapan syariah dalam kebijakan ekonomi. Kolaborasi ini membantu memperkuat posisi mereka dalam sistem politik yang kompetitif dan memastikan bahwa agenda ekonomi syariah tetap menjadi prioritas (Jurdi, 2016).

KESIMPULAN

Partai politik Islam sering kali menghadapi tantangan dalam menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan mekanisme dan nilai-nilai sistem demokrasi yang pluralis dan sekuler. Di negara demokrasi, proses pembuatan kebijakan melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang ideologi yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan ekonomi berbasis syariah memerlukan kompromi dan negosiasi dan solusinya yakni dialog terbuka dan diskusi inklusif, mengutamakan aspek-aspek umum ekonomi syariah, penyusunan kebijakan yang fleksibel dan bertahap, pendekatan koalisi dan aliansi, edukasi dan sosialisasi kepada publik, menyusun argumentasi ekonomi yang kuat, penguatan kapasitas institusi, dan mengakomodasi kepentingan beragam pihak. Selanjutnya peran partai politik Islam untuk negara yang demokrasi dalam kebijakan ekonomi syariah yakni penyesuaian dengan dinamika ekonomi global, dukungan masyarakat dan pluralisme, kapasitas institusional dan implementasi kebijakan dan fragmentasi internal dan persaingan politik.

REFERENSI

- Amane, A. P. O., Mahendra, Y., Yusuf, M., & InayatulFAFaizah, S. (2024). *Sisitem Politik Indonesia* (A. Asari (ed.); 1st ed., Issue 112). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Baharudin. (2022). PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN POLITIK DI INDONESIA. *HARAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(2), 65.
- Budiono, L. A., & Masing, M. (2022). Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Research & Learning in Primary Education*, 2(Vol.2), 579.
- Djakfar, M., Khasanah Umrotul, & Meldona. (2019). Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal. *Syekhnmurjati.Ac.Id*, 11(2), 241. <https://doi.org/10.24235/amwal.v11i2.5188>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Farhan, A. M. (2023). Kaderisasi Partai Politik Berbasis Digital: Studi Kasus Golkar Institute Pada Partai Golongan Karya. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75283>
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia* (1st ed.).
- Khasanah, I. L., & Paryanto, P. (2023). Simbiosis Harmoni: Islam dan Politik dalam Masyarakat Kontemporer. *Kutubkhanah*, 23(1), 82–98. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v23i1.22942>
- Rizwan, M., Abdullah, T., & Faisal, N. (2023). Relasi Islam dan Politik di Berbagai Negara Muslim. *Jtp*, 3(2), 60–67.
- Sarip, Syarifudin, A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol.*, 21(1), 1–9.
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *NOMISMA : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 141.
- Siregar, Z. R. (2020). *Partai Politik Dan Rekrutmen (Studi Sistem Rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Pemuda)*. 1. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57116>
- Suryana, C., Jundy, M., Aini, W. H., & Ramadhan, D. N. (2024). *Menguak jejak politik islam di Indonesia: Membincang partai politik islam, demokrasi dan khilafah perspektif KH. Jujun Junaedi* (A. I. Setiawan (ed.)). Gunung Djati. <https://digilib.uinsgd.ac.id/85028/%0Ahttps://digilib.uinsgd.ac.id/85028/1/MENGUA> K JEJAK POLITIK ISLAM DI INDONESIA.pdf